DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Aditya, M. R. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan.* Semarang: Pustaka Magister.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. (2017). *Legitimasi Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya.

Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Direktorat Hukum. (2021) *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya.* Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Djaja. E. (2010) *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fachrudin, A. (2022) *Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa.* Jakarta Selatan: Pustaka Literasi.

Garuda, W. (2011) *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan. Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gustiani, D. dan Rizki, B. (2018) *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.* Bandar Lampung: Pusaka Media.

Hadjon, P. M., dan Djatmiati. T. S (2022) *Argumentasi Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada *University* Press.

Halimang, S. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Bildung Nusantara.

Huda, N. (2021) *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Huesein. Y. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.* Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Kamil, S. (2018) *Pendidikan Anti Korupsi (Pendekatan Budaya, Politik, dan Teori Integritas)*. Penerbit Erlangga.

Mochtar, Z. A. (2018) *Korupsi dan UNCAC serta Sistem Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Monteiro, J. M. (2020) *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Sleman: Deepublish.

Nurhaeni. (2016). *Korupsi Musuh Kita Bersama.* Yogyakarta: Familia.

Siregar, M. (2023) *Anti Korupsi*. Jawa Timur: Penerbit UWKS PRESS.

Sriwidodo, J. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press.

Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Abdulsalam., dan Masduki. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial.* Malang: Intrans Publishing.

Sumaryati, Suryadi, dan Hastuti, D. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi dalam Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Yogyakarta: UAD Press.*

Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif.* Yogyakarta: Samudra Biru.

Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan Korupsi.* Yogyakarta: Rangkang Education.

Tjandra, W. R (2006) Hukum Keuangan Negara. Grasindo.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

Wibowo, A., dkk. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.

Artikel dalam Jurnal:

Abdullah, F., Eddy, T., Marlina. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah "Advokasi".* Volume 9, Nomor 1 (hlm.20-30).

Andiyani, A. R. (2021) Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia Dan Singapura. *RECIDIVE*, Volume 10, Nomor 1 (hlm.29-36).

Aryana, I. W. P S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum.* Volume 11, Nomor 21 (hlm.39-44).

Astuti, I. (2014). Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Forum Ilmu Sosial.* Volume 41, Nomor 2 (hlm.169-183).

Bakhri, S. (2002). Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-undangan. *Jurnal Hukum.* Volume 9, Nomor 21 (hlm. 87-96).

Cherry, K. B., Sompotan, H. B., dan Voges, S. O. (2021). Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen.* Volume 10, Nomor 2 (hlm.235-242).

Doly, D. (2022). Wacana Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Korupsi. *Info Singkat.* Volume 14, Nomor 21 (hlm.7-12).

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, Volume 5, Nomor 2 (hlm.10-19).

Gultom, P. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.* Volume 3, Nomor 1 (hlm.154-178).

Gunawan, Y. Kristian. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi *the United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Res Nullius Law Journal.* Volume 2, Nomor 1 (hlm.8-34).

Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif *Economic Analysis of Law. Lex Renaissance,* Volume 6, Nomor 3 (hlm.465-480).

Handoyo, S., dkk. (2021). Sarasehan Sebagai Sarana untuk Pencegahan Korupsi di Kapanewon Sleman Yogyakarta. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.8-14).

Haryadi. (2014). Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum.* Volume 5, Nomor 2 (hlm.139-154).

Hasanah, L. (2021). Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi.* Volume 3, Nomor 2 (hlm.41-55).

Hiariej, E. O. S. (2019). *United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia. Volume 31, Nomor 1 (hlm.112-125).

Imanuddin, I., dan Polri, B. (2020). Pendekatan *Restorative Justice* dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17, Nomor 2 (hlm.143-165).

Indrawati, N. (2020). Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. *Law, Development & Justice Review.* Volume 3, Nomor 1 (hlm.99-120).

Irawan, D., Bawole, H., dan Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia. *Lex Administratum*, Volume 10, Nomor 5 (hlm.1-15).

Ismaidar. (2021). *Reconstruction Criminal Sanctions Against Criminal Acts of Corruption Based on Justice Value*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal).* Volume 4, Nomor 3 (hlm.7332-7343).

Kania, D. (2015). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia.* Volume 4, Nomor 1 (hlm.55-72).

Kholifah, R. P. N., Helmi, H., dan Ratomi, A. (2023). Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Koruptor yang Melarikan Diri. *JTAM FH*, Volume 1, Nomor 3 (hlm.222-236).

Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 2 (hlm.1-16).

Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia *(The Urgency of Assets Recovery Act in Indonesia)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 6, Nomor 1 (hlm.17-30).

Lutfi, K. R., dan Putri, R. A. (2020). Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 1 (hlm.33-57).

Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum.* Volume 49, Nomor 3 (hlm.269-271).

Makaruku, S., (2016). Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor: Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Cina. *Jurnal Sasi.* Volume 22, Nomor 1 (hlm.43-53).

Manan, A. (2018). Pembaharuan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003. *Maleo Law Journal.* Volume 2, Nomor 2 (hlm.195-221).

Mandala, M. J., Sinurat, A., dan Manuain, O. G. (2023). Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, Volume 3, Nomor 2 (hlm.851-863).

Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, Volume 22, Nomor 1 (hlm.14-31).

Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3, Nomor 6 (hlm.1-8).

Mulatua, S., Nggeboe, F. (2017). Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas.* Volume 9, Nomor 1 (hlm.46-79).

Muntahar, T. I., Ablisar, M., dan Bariah, C. (2020). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum.* Volume 2, Nomor 1. (hlm.49-63).

Mustofa, M. (2013). Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia: Telaah Kriminologis. *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 42, Nomor 1 (hlm.1-5).

Najib, M. A. (2023). Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial.* Volume 3, Nomor 2 (hlm.160-175).

Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review).* Volume 6, Nomor 2 (hlm.59-73).

Piadi, Y. (2019). Implementasi Restoratif *Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.67-75).

Prasetyaningsih, R. (2017). Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *PJIH.* Volume 4, Nomor 2 (hlm.263-280).

Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 24 (hlm.149-163).

Purnamasari, G. C. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Undang Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum,* Volume 1, Nomor 2 (hlm.1-16).

Putra, A. A.G. B.W., Nahak, S., dan Sugiartha, I. N. G. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui *Double Track System. Jurnal Preferensi Hukum.* Volume 1, Nomor 2 (hlm.196-200).

Putri, R. P. (2019). Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 2 (hlm.129-134)**.**

Rahmat, D. (2020). Formulasi Kebijakan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan,* Volume 8. Nomor 1 (hlm.78-88).

Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (hlm.137-161).

Raranta, O. E. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 382 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Curang. *Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 2 (hlm.199-206).

Rohrohmana, B. (2017). Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS.* Volume 6, Nomor 1 (hlm.44-65).

Rosalina, F. (2022). Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan: Koreksi Atas Wacana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 6, Nomor 2 (hlm.161-180).

Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana *(Non-Conviction Based Asset Forfeiture)* dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi,* Volume 3, Nomor 1 (hlm.16-30)

Setyowati, D., Hudi, N., dan Yustitianingtyas, L. (2016). Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Perspektif Hukum,* Volume 16, Nomor 2 (hlm.202-220).

Siswanto, D. (2013). Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Masalah-Masalah Hukum,* Volume 42, Nomor 1 (hlm.123-130).

Sudarto. (2017). Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS.* Volume 5, Nomor 1 (hlm.109-118).

Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State). Sospol: Jurnal Sosial Politik,* Volume 2, Nomor 1 (hlm.103-122).

Tasrif, M. (2014). Bentuk, Argumen Larangan, dan Upaya Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Hadis Nabi Saw. *Dialogia*, Volume 12, Nomor 1 (hlm.81-111).

Thezar, M. (2020). Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, Volume 2, Nomor 3 (hlm.328-338).

Ume, Y. Y. R. S. (2020). Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional. *Lex Et Societatis,* Volume 8, Nomor 1 (hlm.24-32)

Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?. *Jurnal Ius Constituendum,* Volume 7, Nomor 2 (hlm.307-321).

Wahyuadi, B., Warka, M., dan Hufron. (2023). *Return of State Financial Losses Corruption Criminal Acts. Technium Social Sciences Journal*, Volume 42 (hlm.86-91).

Winarno, R. (2017). Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi di Era Global. *Jurnal Lex Publica,* Volume 4, Nomor 1 (hlm.657-678).

Zahra, M. R., dkk. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menangani Korupsi di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, Volume 1, Nomor 2 (hlm.104-118).

Artikel dalam Internet:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2012. "Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana". Tersedia pada https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf (diakses tanggal 10 September 2024).

CNN Indonesia. 2024. "Daftar Buronan KPK: Harun Masiku, Kirana Kotama hingga Paulus Tannos" Tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241218085955-12 1178586/daftar-buronan-kpk-harun-masiku-kirana-kotama-hingga-paulus-tannos (diakses tanggal 22 Januari 2025) .

Indonesia *Corruption Watch.* 2020. “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2019”. https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2019 (diakses tanggal 23 Februari 2025).

Indonesia *Corruption Watch.* 2021. “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020”. https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2020 (diakses tanggal 23 Februari 2025).

Indonesia *Corruption Watch.* 2022. “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021”. https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2021 (diakses tanggal 23 Februari 2025).

Indonesia *Corruption Watch.* 2023. “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2022”. https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2022 (diakses tanggal 23 Februari 2025).

Indonesia *Corruption Watch*. 2024. “Stagnasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 “Omon-Omon Pemberantasan Korupsi Jokowi”. Tersedia pada https://antikorupsi.org/id/stagnasi-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-omon-omon-pemberantasan-korupsi-jokowi (diakses tanggal 20 Juni 2024).

Indonesia *Corruption Watch.* 2024. “Tren Penindakan Kasus Korupsi 2023”. https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2023 (diakses tanggal 23 Februari 2025).

Nufus, W. H. 2023. “Trik Rafael Alun Sembunyikan Aset: Pakai Nama Istri, Ibu hingga Orang Lain”. Tersedia pada https://news.detik.com/berita/d-6903383/trik-rafael-alun-sembunyikan-aset-pakai-nama-istri-ibu-hingga-orang-lain. (diakses tanggal 22 Januari 2025).

Ocean. 2021. “Aset Sitaan Dikuasai Pihak Lain, Begini Sikap KPK”. Tersedia pada https://radartasik.disway.id/read/16063/aset-sitaan-dikuasai-pihak-lain-begini-sikap-kpk (diakses tanggal 22 Januari 2025).

Tashandra, N., dan Gabrillin, A. (2017). “Setya Novanto, Kasus Hukum dan Kisahnya di Panggung Politik”. Tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/06000031/setya-novanto-kasus-hukum-dan-kisahnya-di-panggung-politik?page=all. (diakses tanggal 12 Desember 2024).

Thea, A. 2024. “Menko Yusril: UU Tipikor Terlalu Lama Mengikuti Warisan Hindia Belanda. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/a/menko-yusril--uu-tipikor-terlalu-lama-mengikuti-warisan-hindia-belanda-lt6758f7c94bb74/ (diakses tanggal 12 Desember 2024).

Thea. A. 2023. “6 Urgensi Keberadaan UU Perampasan Aset. Tersedia pada https://www.hukumonline.com/berita/a/6-urgensi-keberadaan-uu-perampasan-aset-lt6492e35030130/?page=1. (diakses tanggal 9 Desember 2024).

Tiawarman, A. 2024. “Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA”. Tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/10304861/korupsi-timah-rp-271-t-dan-momentum-pembenahan-sektor-sda?page=all (diakses tanggal 3 November 2024).

Transparency International. 2024.*“Corruption Perceptions Index* 2023”. Tersedia pada https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/# (diakses tanggal 20 Juni 2024).

Universitas Pasundan. 2023. “Menkopolhukam Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Harus Jadi Prioritas”. Tersedia pada https://www.unpas.ac.id/menkopolhukam-mahfud-md-ruu-perampasan-aset-harus-jadi-prioritas/ (diakses tanggal 20 Juni 2024).

VivaNews. 2011. “Wakil Wali Kota Bogor Divonis Bebas”. Tersedia pada https://www.viva.co.id/arsip/245581-wakil-walikota-bogor-divonis-bebas (diakses tanggal 22 Januari 2025).

Warjiyati, S. 2024. “Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil”. Tersedia pada https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil (diakses tanggal 9 Desember 2024).

Yandwiputra, A. D., dan Rohmawati, Y. 2023. “Hukuman Lukas Enembe Diperberat Jadi 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar” Tersedia pada https://www.tempo.co/politik/hukuman-lukas-enembe-diperberat-jadi-10-tahun-penjara-dan-denda-rp-1-miliar-111418. (diakses tanggal 12 Desember 2024).

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Amalia, R. 2021. *Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke dalam Skema Pidana Denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Tesis. Program Studi Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hasan, I. N. 2020. *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi.* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kulsum, U. 2008. *Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC).* Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laili, A. S. 2018. *Penerapan Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah dan Perlindungan Hak Tersangka.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Nugroho, R. D. 2021. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif.* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pribadi, M. A., Endrawati, L., dan Zakaria, A. 2015. *Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ramdoni, M. A. 2021. *Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).* Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zahra, R. A. 2018. *Tinjauan Yuridis mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Konvensi Internasional:

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Nomor 185 Tahun 2000. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001. Tambahan Lembaran Negara 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Nomor 141 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

Peraturan Perundang-undangan Negara Lain:

Rules of Prosedure in Cases of Civil Forfeiture, Asset Preservation. Filipina.

Proceeds of Crime Act 2002. Australia.